

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
INSPEKTORAT JENDERAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Haris Munandar
Jabatan: Plt. Inspektur Jenderal

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Airlangga Hartarto
Jabatan: Menteri Perindustrian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

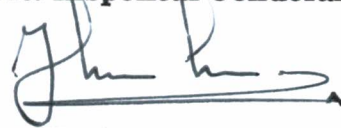
Jakarta, Januari 2018

Menteri Perindustrian



Airlangga Hartarto

Plt. Inspektur Jenderal



Haris Munandar

PERJANJIAN KINERJA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2018

INSPEKTORAT JENDERAL

No.	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Satuan
Perspektif Pemangku Kepentingan				
1.	Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (assurance)	1. Persentase laporan keuangan satuan kerja yang sesuai SAP dan peraturan perundang-undangan *)	92,0	Persen
		2. Penyelesaian tindak lanjut saran/rekomendasi hasil pengawasan *)	88,0	Persen
		3. Satuan kerja yang diusulkan untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM *)	10,0	Satuan Kerja
2.	Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan kebijakan, program dan pengendalian internal (consulting)	1. Tingkat kematangan SPIP Satker mencapai tingkat 3 *)	100,0	Persen
		2. Level kapabilitas APIP Kementerian Perindustrian *)	3,0	Level IACM
		3. Rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola pemerintahan yang dapat *)	4,0	Laporan
		4. Persentase Nilai SAKIP Unit Eselon I AA	66,7	Persen
		5. Persentase konsultasi dan pengaduan masyarakat yang tertangani	90,0	Persen
Perspektif Proses Bisnis Internal				
3.	Tersedianya Rumusan Kebijakan Pengawasan Internal Berbasis Resiko	1. Tersedianya kebijakan pengawasan tahun 2019 yang berbasis resiko	1,0	Peraturan
		2. Tersedianya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berbasis resiko	1,0	Peraturan
4.	Terselenggaranya Layanan Pengawasan yang efektif dan efisien	1. Persentase jumlah rekomendasi hasil revidu perencanaan dan anggaran yang ditindaklanjuti	70,0	Persen
		2. Sistem manajemen pengawasan yang tersertifikasi ISO 9001 : 2015	1,0	Sertifikat
5.	Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal yang efektif	1. Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	70,0	Persen
		2. Persentase pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan	85,0	Persen
Perspektif Kelembagaan				
6.	Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas	1. Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/ profesi sesuai kebutuhan organisasi	90,0	Persen
		2. Persentase auditor yang mendapatkan diklat penjenjangan sesuai dengan kebutuhan	10,0	Persen
7.	Tersedianya bahan informasi pengawasan dalam rangka menunjang kegiatan pengawasan yang mudah diakses	1. Persentase pelaksanaan pengawasan yang berbasis IT	50,0	Persen
8.	Terwujudnya birokrasi yang efektif dalam lingkup pengawasan internal	1. Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal	AA	Nilai
		2. Level Maturitas SPIP Inspektorat Jenderal	3	Nilai

9.	Tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta	1. Akuntabilitas Laporan Keuangan dan BMN Inspektorat Jenderal	Standar capaian tertinggi	Nilai
		2. Persentase anggaran Inspektorat Jenderal yang diblokir	10,0	Persen
		3. Persentase status pengelolaan BMN Inspektorat Jenderal	90,0	Persen
		4. Persentase kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen perencanaan	90,0	Persen

*) Indikator Kinerja Utama

Total Anggaran Tahun 2018 : Rp. 43.616.390.000,-

(Empat puluh tiga milyar enam ratus enam belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Menteri Perindustrian,



Airlangga Hartarto

Jakarta,

Plt. Inspektur Jenderal



Haris Munandar

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Liliék Widodo
Jabatan: Sekretaris Inspektorat Jenderal
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Haris Munandar N.
Jabatan: Plt. Inspektur Jenderal
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

Plt. Inspektur Jenderal



Haris Munandar N.

Sekretaris Inspektorat Jenderal



Liliék Widodo

PERJANJIAN KINERJA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2018

SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL

No.	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja (IK)	Target	Satuan
Perspektif Pemangku Kepentingan				
1.	Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (assurance)	1. Penyelesaian tindak lanjut saran/rekomendasi hasil pengawasan *)	88,0	Persen
		2. Satuan kerja yang diusulkan untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM *)	10,0	Satuan Kerja
2.	Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan kebijakan, program dan pengendalian internal (consulting)	1. Level kapabilitas APIP Kementerian Perindustrian *)	3,0	Level IACM
		2. Persentase konsultasi dan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang tertangani	90,0	Persen
Perspektif Proses Bisnis Internal				
3.	Tersedianya Rumusan Kebijakan Pengawasan Internal Berbasis Resiko	1. Tersedianya kebijakan pengawasan berbasis resiko	1	Peraturan
		2. Tersedianya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis resiko	1	Peraturan
4.	Terselenggaranya Layanan Pengawasan yang efektif dan efisien	1. Penerapan Standar Operasi Prosedur (SOP) Manajemen Pengawasan yang tersertifikasi ISO	26	SOP

*) Indikator Kinerja Utama

Total Anggaran Tahun 2018 : Rp. 31.851.622.000,-

(Tiga puluh satu milyar delapan ratus lima puluh satu juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Program : Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian

Kegiatan : Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal

Plt. Inspektur Jenderal

Haris Munandar N.

Jakarta,
Sekretaris Inspektorat Jenderal

Liliek Widodo

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
INSPEKTORAT I

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dadi Marhadi
Jabatan: Inspektur I

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Haris Munandar N.
Jabatan: Plt. Inspektur Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

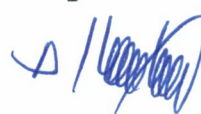
Jakarta,

Plt. Inspektur Jenderal



Haris Munandar N.

Inspektur I



Dadi Marhadi

PERJANJIAN KINERJA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2018

INSPEKTORAT I

No.	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja (IK)	Target	Satuan
Perspektif Pemangku Kepentingan				
1.	Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (assurance)	1. Persentase laporan keuangan satuan kerja yang sesuai SAP dan peraturan perundang-undangan *)	92,0	Persen
		2. Persentase temuan BPK di bawah <i>materiality threshold</i> *)	<3	Persen
2.	Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan kebijakan, program dan pengendalian internal (consulting)	1. Rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola pemerintahan yang dapat ditindaklanjuti *)	1,0	Rekomendasi
		2. Persentase Nilai SAKIP Unit Eselon I yang mendapatkan nilai AA	50,0	Persen
		3. Persentase konsultasi dan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang tertangani	90,0	Persen
Perspektif Proses Bisnis Internal				
3.	Terselenggaranya Layanan Pengawasan yang efektif dan efisien	1. Persentase jumlah rekomendasi hasil reviu perencanaan dan anggaran yang ditindaklanjuti	70,0	Persen
		2. Penerapan Standar Operasi Prosedur (SOP) Manajemen Pengawasan yang tersertifikasi ISO	2,0	SOP
4.	Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal yang efektif	1. Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	80,0	Persen
		2. Nilai rata-rata pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan	85,0	Persen

*) Indikator Kinerja Utama

Total Anggaran Tahun 2018 : Rp. 2.833.687.000,-

(Dua milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Program : Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian

Kegiatan : Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I

Plt. Inspektur Jenderal

Haris Munandar N.

Jakarta,

Inspektur I

Dadi Marhadi

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
INSPEKTORAT II**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Edy Waspan
Jabatan: Inspektur II

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Haris Munandar N.
Jabatan: Plt. Inspektur Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

Plt. Inspektur Jenderal



Haris Munandar N.

Inspektur II



Edy Waspan

PERJANJIAN KINERJA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2018

INSPEKTORAT II

No.	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja (IK)	Target	Satuan
Perspektif Pemangku Kepentingan				
1.	Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (assurance)	1. Persentase laporan keuangan satuan kerja yang sesuai SAP dan peraturan perundang-undangan *)	92,0	Persen
		2. Persentase temuan BPK di bawah <i>materiality threshold</i> *)	<3	Persen
2.	Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan kebijakan, program dan pengendalian internal (consulting)	1. Tingkat kematangan SPIP Satker mencapai tingkat 3 *)	100,0	Persen
		2. Persentase Nilai SAKIP Unit Eselon I yang mendapatkan nilai AA	100,0	Persen
		3. Persentase konsultasi dan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang tertangani	90,0	Persen
Perspektif Proses Bisnis Internal				
3.	Terselenggaranya Layanan Pengawasan yang efektif dan efisien	1. Persentase jumlah rekomendasi hasil reviu perencanaan dan anggaran yang ditindaklanjuti	70,0	Persen
		2. Penerapan Standar Operasi Prosedur (SOP) Manajemen Pengawasan yang tersertifikasi ISO	2,0	SOP
4.	Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal yang efektif	1. Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	80,0	Persen
		2. Nilai rata-rata pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan	85,0	Persen

*) Indikator Kinerja Utama

Total Anggaran Tahun 2018 : Rp. 2.996.779.000,-

(Dua milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Program : Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian

Kegiatan : Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat II

Plt. Inspektur Jenderal

Haris Munandar N.

Jakarta,

Inspektur II

Edy Waspan

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
INSPEKTORAT III**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Pranata
Jabatan: Inspektur III

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Haris Munandar N.
Jabatan: Plt. Inspektur Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

Plt. Inspektur Jenderal



Haris Munandar N.

Inspektur III



Pranata

PERJANJIAN KINERJA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2018

INSPEKTORAT III

No.	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja (IK)	Target	Satuan
Perspektif Pemangku Kepentingan				
1.	Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (assurance)	1. Persentase laporan keuangan satuan kerja yang sesuai SAP dan peraturan perundang-undangan *)	92,0	Persen
		2. Persentase temuan BPK di bawah <i>materiality threshold</i> *)	<3	Persen
2.	Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan kebijakan, program dan pengendalian internal (consulting)	1. Rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola pemerintahan yang dapat ditindaklanjuti *)	1,0	Rekomendasi
		2. Persentase Nilai SAKIP Unit Eselon I yang mendapatkan nilai AA	100,0	Persen
		3. Persentase konsultasi dan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang tertangani	90,0	Persen
Perspektif Proses Bisnis Internal				
3.	Terselenggaranya Layanan Pengawasan yang efektif dan efisien	1. Persentase jumlah rekomendasi hasil reviu perencanaan dan anggaran yang ditindaklanjuti	70,0	Persen
		2. Penerapan Standar Operasi Prosedur (SOP) Manajemen Pengawasan yang tersertifikasi ISO	2,0	SOP
4.	Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal yang efektif	1. Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	80,0	Persen
		2. Nilai rata-rata pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan	85,0	Persen

*) Indikator Kinerja Utama

Total Anggaran Tahun 2018 : Rp. 2.942.746.000,-

(Dua milyar sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Program : Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian

Kegiatan : Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat III

Plt. Inspektur Jenderal

Haris Munandar N.

Jakarta,

Inspektur III

Pranata

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
INSPEKTORAT IV

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : R Janu Suryanto
Jabatan: Inspektur IV

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Haris Munandar N.
Jabatan: Plt. Inspektur Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

Plt. Inspektur Jenderal



Haris Munandar N.

Inspektur IV



R Janu Suryanto

PERJANJIAN KINERJA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2018

INSPEKTORAT IV

No.	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja (IK)	Target	Satuan
Perspektif Pemangku Kepentingan				
1.	Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (assurance)	1. Persentase laporan keuangan satuan kerja yang sesuai SAP dan peraturan perundang-undangan *)	92,0	Persen
		2. Persentase temuan BPK di bawah <i>materiality threshold</i> *)	<3	Persen
2.	Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan kebijakan, program dan pengendalian internal (consulting)	1. Rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola pemerintahan yang dapat ditindaklanjuti *)	1,0	Rekomendasi
		2. Persentase Nilai SAKIP Unit Eselon I yang mendapatkan nilai AA	67,0	Persen
		3. Persentase konsultasi dan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang tertangani	90,0	Persen
Perspektif Proses Bisnis Internal				
3.	Terselenggaranya Layanan Pengawasan yang efektif dan efisien	1. Persentase jumlah rekomendasi hasil reviu perencanaan dan anggaran yang ditindaklanjuti	70,0	Persen
		2. Penerapan Standar Operasi Prosedur (SOP) Manajemen Pengawasan yang tersertifikasi ISO	2,0	SOP
4.	Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal yang efektif	1. Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	80,0	Persen
		2. Nilai rata-rata pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan	85,0	Persen

*) Indikator Kinerja Utama

Total Anggaran Tahun 2018 : Rp. 2.991.556.000,-

(Dua milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Program : Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian

Kegiatan : Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat IV

Plt. Inspektur Jenderal

Haris Munandar N.

Jakarta,

Inspektur IV

R. Janu Suryanto



**MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA**

LEMBAR DISPOSISI

 Rahasia
 Penting/Segera
 Biasa

Kode :
62/INT/M/2018 Itjen

Tanggal : 06-12-
2018



#214628383214801595 ----- 6308E

Nomor : 771.1/IJ-IND/11/2018 Tgl. 30-11-2018
Asal Surat : Irjen
Perihal : Konsep Revisi Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal
 Tahun 2018
Keterangan : 1 (satu) berkas mohon TTD

Paraf Sesmen

DITERUSKAN KEPADA:

- Sekretaris Jenderal**
 Inspektur Jenderal
 Direktur Jenderal Industri Agro
 Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil dan Aneka
 Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika
 Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah
 Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri
 Direktur Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional
 Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
 Staf Ahli Bidang Penguatan Struktur Industri
 Staf Ahli Bidang Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri
 Staf Ahli Bidang Sumber Daya Industri
 Staf Khusus Menteri
 Tenaga Ahli Menteri

LAJUR DISPOSISI:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Siapkan Bahan
<input type="checkbox"/> Untuk ditindaklanjuti
<input type="checkbox"/> Bahas dengan saya
<input type="checkbox"/> Dipelajari/Dicermati
<input type="checkbox"/> Harap saran/Penjelasan
<input type="checkbox"/> Untuk diketahui/dipergunakan seperlunya | <input type="checkbox"/> Agar dimonitor
<input type="checkbox"/> Segera buat laporan
<input type="checkbox"/> Siapkan konsep jawaban
<input type="checkbox"/> Tanggapan
<input type="checkbox"/> Mewakili Menteri
<input type="checkbox"/> Mendampingi
<input type="checkbox"/> Lain-lain |
|--|--|

Menteri Perindustrian

Airlangga Hartarto

Airlangga Hartarto

Perhatian:

1. **Penyelesaian disposisi Menteri tidak lebih dari 5 (lima) hari kerja**
2. **Pengembalian hasil koreksi Menteri harus diparaf kembali oleh pejabat terkait**
3. **Setelah diselesaikan harap dikembalikan pada Sekretaris Pribadi Menteri**
4. **Dilarang memisahkan sehelai suratpun dari berkas yang disusun ini**

MEMO DINAS

Nomor : 711/IJ-IND/11/2018

Yth : Menteri Perindustrian
Dari : Inspektur Jenderal
Perihal : Konsep Revisi Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2018
Tanggal : 30 November 2018
Lampiran : 1 (satu) berkas

Sehubungan dengan pergantian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian, dengan hormat terlampir kami sampaikan konsep revisi dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2018.

Apabila Bapak berkenan, mohon untuk dapat menandatangani konsep dokumen dimaksud.

Demikian, atas perhatian dan arahan Bapak lebih lanjut kami sampaikan terima kasih.

Tembusan:

1. Sekretaris Inspektorat Jenderal.



INSPEKTUR JENDERAL
SETYO WASISTO

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
INSPEKTORAT JENDERAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Setyo Wasisto
Jabatan: Inspektur Jenderal

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Airlangga Hartarto
Jabatan: Menteri Perindustrian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 November 2018

Menteri Perindustrian



Airlangga Hartarto

Inspektur Jenderal



Setyo Wasisto

PERJANJIAN KINERJA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2018

INSPEKTORAT JENDERAL

No.	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja (IK)	Target	Satuan
Perspektif Pemangku Kepentingan				
1.	Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (assurance)	1. Persentase laporan keuangan satuan kerja yang sesuai SAP dan peraturan perundang-undangan*)	92,0	Persen
		2. Penyelesaian tindak lanjut saran/rekomendasi hasil pengawasan *)	88,0	Persen
		3. Satuan kerja yang diusulkan untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM *)	10,0	Satuan Kerja
2.	Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan kebijakan, program dan pengendalian internal (consulting)	1. Tingkat kematangan SPIP Satker mencapai tingkat 3 *)	100,0	Persen
		2. Level kapabilitas APIP Kementerian Perindustrian *)	3,0	Level IACM
		3. Rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola pemerintahan yang dapat ditindaklanjuti *)	4,0	Laporan
		4. Persentase Nilai SAKIP Unit Eselon I AA	66,67	Persen
		5. Persentase konsultasi dan pengaduan masyarakat berwawasan pengawasan yang tertangani	90,0	Persen
Perspektif Proses Bisnis Internal				
3.	Tersedianya Rumusan Kebijakan Pengawasan Internal Berbasis Resiko	1. Tersedianya kebijakan pengawasan tahun yang akan datang berbasis resiko	1,0	Peraturan
		2. Tersedianya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berbasis resiko	1,0	Peraturan
4.	Terselenggaranya Layanan Pengawasan yang efektif dan efisien	1. Persentase jumlah rekomendasi hasil reuiu perencanaan dan anggaran yang ditindaklanjuti	70,0	Persen
		2. Sistem Manajemen Pengawasan yang tersertifikasi ISO 9001:2015	1,0	Sertifikat
5.	Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal yang efektif	1. Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	70,0	Persen
		2. Persentase pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan	85,0	Persen

*) Indikator Kinerja Utama

Total Anggaran Tahun 2018 : : Rp. 43.616.390.000,-

(Empat puluh tiga milyar enam ratus enam belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Program : Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian

Jakarta, 15 November 2018

Menteri Perindustrian,


Airlangga Hartarto

Inspektur Jenderal


Setyo Wasisto



MEMO DINAS

Nomor : 1193.VIJ-IND.1/11/2018

Yth : Inspektur Jenderal
Dari : Sekretaris Inspektorat Jenderal
Perihal : Konsep Revisi Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2018
Tanggal : 30 November 2018
Lampiran : 1 (satu) berkas

Sehubungan dengan pergantian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian, dengan hormat terlampir kami sampaikan konsep revisi dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018, yaitu :

1. Perjanjian Kinerja 5 eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal yang telah ditandatangani masing-masing pejabatnya;
2. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal yang akan diajukan persetujuan kepada Menteri Perindustrian.

Apabila Bapak berkenan, mohon untuk dapat menandatangani konsep dokumen dimaksud.

Demikian, atas perhatian dan arahan Bapak lebih lanjut kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Inspektorat Jenderal

Liliek Widodo

Tembusan:

1. Kepala Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Liliek Widodo
Jabatan: Sekretaris Inspektorat Jenderal

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Setyo Wasisto
Jabatan: Inspektur Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 November 2018

Inspektur Jenderal

Sekretaris Inspektorat Jenderal



Setyo Wasisto



Liliek Widodo

PERJANJIAN KINERJA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2018

SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL

No.	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja (IK)	Target	Satuan
Perspektif Pemangku Kepentingan				
1.	Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (assurance)	1. Penyelesaian tindak lanjut saran/rekomendasi hasil pengawasan *)	88,0	Persen
		2. Satuan kerja yang diusulkan untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM *)	10,0	Satuan Kerja
2.	Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan kebijakan, program dan pengendalian internal (consulting)	1. Level kapabilitas APIP Kementerian Perindustrian *)	3,0	Level IACM
		2. Persentase konsultasi dan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang tertangani	90,0	Persen
Perspektif Proses Bisnis Internal				
3.	Tersedianya Rumusan Kebijakan Pengawasan Internal Berbasis Resiko	1. Tersedianya kebijakan pengawasan yang berbasis resiko	1	Peraturan
		2. Tersedianya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis resiko	1	Peraturan
4.	Terselenggaranya Layanan Pengawasan yang efektif dan efisien	1. Penerapan Standar Operasi Prosedur (SOP) Manajemen Pengawasan yang tersertifikasi ISO	26	SOP

*) Indikator Kinerja Utama

Total Anggaran Tahun 2018 : Rp.31.851.622.000,-

(Tiga puluh satu milyar delapan ratus lima puluh satu juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Program : Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian

Kegiatan : Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal

Jakarta, 15 November 2018

Sekretaris Inspektorat Jenderal

Inspektur Jenderal



Setyo Wasisto



Liliek Widodo

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
INSPEKTORAT I**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arus Gunawan

Jabatan: Inspektur I

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Setyo Wasisto

Jabatan: Inspektur Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Jakarta, 15 November 2018

Inspektur Jenderal



Setyo Wasisto

Inspektur I



Arus Gunawan

PERJANJIAN KINERJA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2018

INSPEKTORAT I

No.	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja (IK)	Target	Satuan
Perspektif Pemangku Kepentingan				
1.	Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (assurance)	1. Persentase laporan keuangan satuan kerja yang sesuai SAP dan peraturan perundang-undangan*)	92,0	Persen
		2. Persentase temuan BPK di bawah <i>materiality threshold</i> *)	<3	Persen
2.	Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan kebijakan, program dan pengendalian internal (consulting)	1. Rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola pemerintahan yang dapat ditindaklanjuti*)	1,0	Rekomendasi
		2. Persentase Nilai SAKIP Unit Eselon I yang mendapatkan nilai AA	50,0	Persen
		3. Persentase konsultasi dan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang tertangani	90,0	Persen
Perspektif Proses Bisnis Internal				
3.	Terselenggaranya Layanan Pengawasan yang efektif dan efisien	1. Persentase jumlah rekomendasi hasil reviu perencanaan dan anggaran yang ditindaklanjuti	70,0	Persen
		2. Penerapan Standar Operasi Prosedur (SOP) Manajemen Pengawasan yang tersertifikasi ISO	2,0	SOP
4.	Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal yang efektif	1. Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	80,0	Persen
		2. Nilai rata-rata pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan	85,0	Persen

*)Indikator Kinerja Utama


Total Anggaran Tahun 2018 : Rp. 2.833.687.000,-

(Dua milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Program : Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian

Kegiatan : Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I

Inspektur Jenderal



Setyo Wasisto

Jakarta, 15 November 2018

Inspektur I



Arus Gunawan

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
INSPEKTORAT II**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Achmad Rodjih Almanshoer
Jabatan: Inspektur II

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Setyo Wasisto
Jabatan: Inspektur Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 November 2018

Inspektur Jenderal



Setyo Wasisto

Inspektur II



Achmad Rodjih Almanshoer

PERJANJIAN KINERJA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2018

INSPEKTORAT II

No.	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Satuan
Perspektif Pemangku Kepentingan				
1.	Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (assurance)	1. Persentase laporan keuangan satuan kerja yang sesuai SAP dan peraturan perundang-undangan.)*	92,0	Persen
		2. Persentase temuan BPK di bawah <i>materiality threshold</i> .)*	<3	Persen
2.	Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan kebijakan, program dan pengendalian internal (consulting)	1. Tingkat kematangan SPIP Satker mencapai tingkat 3.)*	100,0	Persen
		2. Persentase Nilai SAKIP Unit Eselon I mendapatkan nilai AA	100,0	Persen
		3. Persentase konsultasi dan pengaduan masyarakat yang tertangani	90,0	Persen
Perspektif Proses Bisnis Internal				
3.	Terselenggaranya Layanan Pengawasan yang efektif dan efisien	1. Persentase jumlah rekomendasi hasil reviu perencanaan dan anggaran yang ditindaklanjuti	70,0	Persen
		2. Penerapan Standar Operasi Prosedur (SOP) Manajemen Pengawasan yang tersertifikasi ISO	2,0	SOP
4.	Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal yang efektif	1. Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	80,0	Persen
		2. Nilai rata-rata pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan	85,0	Persen

)*Indikator Kinerja Utama

Total Anggaran Tahun 2018 : Rp. 2.996.779.000,-

(Dua milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Program : Peningkatan dan Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian

Kegiatan : Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat II

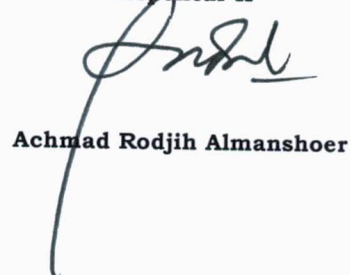
Inspektur Jenderal



Setyo Wasisto

Jakarta, 15 November 2018

Inspektur II



Achmad Rodjih Almanshoer

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
INSPEKTORAT III

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Pranata
Jabatan: Inspektur III

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Setyo Wasisto
Jabatan: Inspektur Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 November 2018

Inspektur Jenderal



Setyo Wasisto

Inspektur III



Pranata

PERJANJIAN KINERJA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2018

INSPEKTORAT III

No.	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja (IK)	Target	Satuan
Perspektif Pemangku Kepentingan				
1.	Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (<i>assurance</i>)	1. Persentase laporan keuangan satuan kerja yang sesuai SAP dan peraturan perundang-undangan*	92,0	Persen
		2. Persentase temuan BPK di bawah <i>materiality threshold</i> *	< 3	Persen
2.	Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan kebijakan, program dan pengendalian internal (<i>consulting</i>)	1. Rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola pemerintahan yang dapat ditindaklanjuti*	1,0	Laporan
		2. Persentase Nilai SAKIP Unit Eselon I yang mendapatkan nilai AA	100,0	Persen
		3. Persentase konsultasi dan pengaduan masyarakat berwawasan pengawasan yang tertangani	90,0	Persen
Perspektif Proses Bisnis Internal				
3.	Terselenggaranya Layanan Pengawasan yang efektif dan efisien	1. Persentase jumlah rekomendasi hasil reviu perencanaan dan anggaran yang ditindaklanjuti	70,0	Persen
		2. Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Manajemen Pengawasan yang tersertifikasi ISO 9001:2015	2,0	SOP
4.	Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal yang efektif	1. Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	80,0	Persen
		2. Nilai rata-rata pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan	85,0	Persen

*Indikator Kinerja Utama

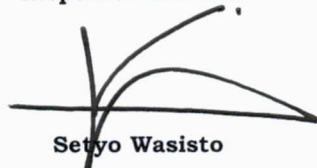
Total Anggaran Tahun 2018 : Rp. 2.942.746.000,-

(Dua milyar sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Program : Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian
 Kegiatan : Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat III

Jakarta, 15 November 2018

Inspektur Jenderal



Setyo Wasisto

Inspektur III



Pranata



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Liliek Widodo

Jabatan : Plt. Inspektur IV

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Setyo Wasisto

Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 November 2018

Pihak Kedua



Setyo Wasisto

Pihak Pertama



Liliek Widodo

PERJANJIAN KINERJA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2018

INSPEKTORAT IV

No.	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja (IK)	Target	Satuan
Perspektif Pemangku Kepentingan				
1.	Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (assurance) *	1. Persentase laporan keuangan satuan kerja yang sesuai SAP dan peraturan perundang-undangan *	92,0	Persen
		2. Persentase temuan BPK di bawah <i>materiality threshold</i> *	<3	Persen
2.	Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan kebijakan, program dan pengendalian internal (consulting)	1. Rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola pemerintahan yang dapat ditindaklanjuti *	1,0	Laporan
		2. Persentase Nilai SAKIP Unit Eselon I yang mendapatkan nilai AA	67,0	Persen
		3. Persentase konsultasi dan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang tertangani	90,0	Persen
Perspektif Proses Bisnis Internal				
3.	Terselenggaranya Layanan Pengawasan yang efektif dan efisien	1. Persentase jumlah rekomendasi hasil reviu perencanaan dan anggaran yang ditindaklanjuti	70,0	Persen
		2. Penerapan Standar Operasi Prosedur (SOP) Manajemen Pengawasan yang tersertifikasi ISO	2,0	SOP
4.	Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal yang efektif	1. Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	80,0	Persen
		2. Nilai rata-rata pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan	85,0	Persen

Total Anggaran Tahun 2018 : Rp. 2.991.556.000,-

(Dua milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Program : Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian
 Kegiatan : Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat IV

Indikator Kinerja Utama : 1. Persentase laporan keuangan satuan kerja yang sesuai SAP dan peraturan perundang-undangan *
 2. Persentase temuan BPK di bawah *materiality threshold* *
 3. Rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola pemerintahan yang dapat ditindaklanjuti *

Jakarta, 15 November 2018

Inspektur Jenderal

Setyo Wasisto

Plt. Inspektur IV

Liliek Widodo

PERJANJIAN KINERJA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2018

INSPEKTORAT IV

No.	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja (IK)	Target	Satuan
Perspektif Pemangku Kepentingan				
1.	Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (assurance) *)	1. Persentase laporan keuangan satuan kerja yang sesuai SAP dan peraturan perundang-undangan *)	92,0	Persen
		2. Persentase temuan BPK di bawah <i>materiality threshold</i> *)	<3	Persen
2.	Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan kebijakan, program dan pengendalian internal (consulting)	1. Rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola pemerintahan yang dapat ditindaklanjuti *)	1,0	Laporan
		2. Persentase Nilai SAKIP Unit Eselon I yang mendapatkan nilai AA	67,0	Persen
		3. Persentase konsultasi dan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang tertangani	90,0	Persen
Perspektif Proses Bisnis Internal				
3.	Terselenggaranya Layanan Pengawasan yang efektif dan efisien	1. Persentase jumlah rekomendasi hasil reviu perencanaan dan anggaran yang ditindaklanjuti	70,0	Persen
		2. Penerapan Standar Operasi Prosedur (SOP) Manajemen Pengawasan yang tersertifikasi ISO	2,0	SOP
4.	Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal yang efektif	1. Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	80,0	Persen
		2. Nilai rata-rata pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan	85,0	Persen

*) Indikator Kinerja Utama

Total Anggaran Tahun 2018 : Rp. 2.991.556.000,-

(Dua milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Program : Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian

Kegiatan : Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat IV

Inspektur Jenderal



Setyo Wasisto

Jakarta, 15 November 2018

Plt. Inspektur IV



Liliek Widodo

